

PEMBERDAYAAN PMKS DI LIPONSOS KEPUTIH KOTA SURABAYA

Kumara Adyatma Ian Daksana¹, Achluddin Ibnu Rochim²

^{1,2}Program Studi Administrasi Publik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
kumaraxxx113@gmail.com, didin@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Kota Surabaya menjadi pusat kegiatan perekonomian di Provinsi Jawa Timur dan memiliki jumlah penduduk terpadat, dengan padatnya jumlah penduduk yang ada di Kota Surabaya membuat masyarakat kurang mendapatkan perhatian sehingga menimbulkan masalah kesejahteraan sosial. Permasalahan kesejahteraan sosial yang terjadi di Kota Surabaya salah satunya yaitu maraknya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial oleh sebab itu dengan hadirnya instansi pemerintah yaitu UPTD Lingkungan Pondok Sosial Keputih untuk melakukan pemberdayaan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial agar dapat meningkatkan potensi. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan PMKS yang dilakukan oleh UPTD Liponsos Keputih Surabaya dan untuk mengetahui faktor pendukung serta faktor penghambat dalam pemberdayaan PMKS di UPTD Liponsos Keputih. Pengabdian ini menggunakan jenis pendekatan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan hasil observasi, wawancara dan menggunakan metode penelitian studi kasus. Studi kasus dilakukan untuk menganalisis prosedur pelayanan penerimaan dan pengambilan PMKS di UPTD Liponsos.

Kata kunci : Pemberdayaan, PMKS, Liponsos

ABSTRACT

The city of Surabaya is the center of economic activity in East Java Province and has the densest population. With the dense population in the city of Surabaya, the community receives less attention, giving rise to social welfare problems. One of the social welfare problems that occur in the city of Surabaya is the increasing number of people with social welfare problems, therefore with the presence of a government agency, namely the UPTD Environmental Pondok Social Keputih, to empower people with social welfare problems so that they can increase their potential. The aim of this research is to find out how PMKS empowerment is carried out by UPTD Liponsos Keputih Surabaya and to find out the supporting and inhibiting factors in empowering PMKS at UPTD Liponsos Keputih. This service uses a descriptive qualitative research method approach, with the results of observations, interviews and using case study research methods. A case study was conducted to analyze the service procedures for receiving and collecting PMKS at UPTD Liponsos.

Keywords : Empowerment, PMKS, Liponsos

PENDAHULUAN

Rendahnya tingkat ekonomi dapat mengakibatkan tingginya jumlah masyarakat miskin serta banyaknya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada di Indonesia. Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Hal ini membuat pihak pemerintah membuat program dengan istilah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang terdiri dari beberapa masalah yang ada di Indonesia. Penanganan masalah kesejahteraan sosial melalui pembangunan kesejahteraan sosial perlu terus dilanjutkan secara berkesinambungan dan ditingkatkan agar apa yang telah dicapai dapat terus ditingkatkan dan jangkauan pelayanan dapat diperluas. Undang-undang yang mengatur tentang kesejahteraan sosial yaitu Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan sosial yang mengamanatkan agar pemerintah kota, pemerintah daerah dan masyarakat menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi warga masyarakat yang kurang

beruntung dan rentan, serta melakukan penanggulangan kemiskinan. Di dalam undang-undang tersebut pada bagian bab 3 mengenai penyelenggaraan kesejahteraan sosial tepatnya pasal 5 yang bagian nomor 2 berisi mengenai kriteria masalah sosial yaitu meliputi kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana dan korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Provinsi Jawa Timur adalah sebuah provinsi yang mempunyai penduduk dengan jumlah terpadat setelah Jawa Barat, dan terus mengalami pertumbuhan penduduk di setiap tahunnya. Sebaran penduduk yang adarelatif merata di Kabupaten dan Kota tetapi konsentrasi jumlah penduduk terbesar tetap di tempati oleh wilayah perkotaan yang menempati wilayah Jawa Timur. Salah satunya yaitu Kota Surabaya. Kota Surabaya adalah Kota terbesar yang menjadi pusat kegiatan perekonomian di Provinsi Jawa Timur. Dilansir dari Badan Pusat Statistik Jumlah Penduduk Kota Surabaya menurut jenis kelamin pada Tahun 2022 sebesar 2.887. 223 jiwa. Dengan padatnya jumlah penduduk yang ada di Kota Surabaya membuat masyarakat kurang mendapatkan perhatian sehingga menimbulkan permasalahan kesejahteraan sosial. Maraknya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial menjadi salah satu permasalahan kesejahteraan sosial yang terjadi di Kota Surabaya. PMKS atau biasa disebut Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial merupakan individu atau keluarga yang mengalami disfungsi sosial karena adanya hambatan dan kesulitan yang terjadi sehingga mereka tidak dapat menjalin hubungan yang seimbang dengan lingkungan disekitarnya sehingga membuat kebutuhan mereka tidak dapat terpenuhi dengan baik. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sendiri banyak ditemui keberadaanya di tempat umum seperti emperan toko, lampu merah, kolong jembatan, bahkan pinggiran rel kereta api. Para PMKS ini menjadikan tempat umum sebagai pemukiman dikarenakan tidak sanggup menyewa tempat tinggal atau untuk menekan biaya pengeluaran sehingga memanfaatkan lahan yang ada untuk dijadikan tempat tinggal. sementara hal ini yang nantinya dapat mengganggu masyarakat dan dapat merusak keindahan dari Kota Surabaya.

Populasi PMKS yang ada di Kota Surabaya jika dibiarkan akan bertambah banyak dan dapat berdampak buruk untuk kawasan Kota Surabaya yaitu itu keberadaannya dapat mengganggu segala kegiatan masyarakat di jalan raya, tetapi jumlah PMKS tidak hanya didominasi oleh penduduk Kota Surabaya melainkan ada yang berasal dari penduduk luar Kota Surabaya. Selain itu ditambah jumlah PMKS tidak hanya sendiri mereka memiliki keluarga. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial termasuk orang dalam golongan miskin dengan rendahnya latar belakang pendidikan bahkan ada yang tidak pernah mengenyam dunia pendidikan dan harus bersaing dengan penduduk lainnya dalam mendapatkan pekerjaan sehingga mereka bertahan hidup dengan cara menjadi pengemis, pemulung, pengamen agar bisa mendapatkan penghasilan meskipun tidak seberapa, selain itu adayang menjadi gelandangan akibat tidak mempunyai tempat tinggal yang memadai. Oleh sebab itu perlunya hal ini memperoleh perhatian khusus dari pemerintah agar populasinya tidak membludak dan para PMKS mendapatkan pembinaan. Pada akhirnya Pemerintah Kota Surabaya menciptakan program untuk dapat mengatasi masalah kesejahteraan sosial dengan membangun Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) Keputih yang dibentuk oleh Dinas Sosial Kota Surabaya sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Berdirinya Liponsos ditujukan untuk memberikan fasilitas pelayanan seperti tempat penampungan serta rehabilitasi, pembinaan dan pemberdayaan bagi PMKS Fungsi UPTD Liponsos Kota Surabaya dalam melakukan pelayanan dan pembinaan kehidupan yang layak masih belum tercukupi secara maksimal, berdasarkan situasi yang penulis amati kondisi di

UPTD Liponsos Keputih Kota Surabaya hanya memenuhi kebutuhan dasar bagi para gepeng dan anak jalanan.

METODE PELAKSANAAN

Pengabdian ini dilaksanakan di UPTD Liponsos Keputih Kota Surabaya. Pengumpulan data yang dilakukan dalam waktu 40 hari dengan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi secara langsung. Data dan informasi yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh melalui penelusuran literatur wawancara terkait oleh narasumber yang ada Liponsos Keputih Surabaya. Studi pengabdian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana proses pemberdayaan klien PMKS di Liponsos Keputih Surabaya. Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dan merumuskan strategi yang tepat. Informasi yang diperoleh dari studi pengabdian akan digunakan untuk memberikan contoh konkret tentang bagaimana proses pemberdayaan klien PMKS di Liponsos Keputih Surabaya dan dapat membantu meningkatkan kompetensi para pegawai yang ada di Liponsos Keputih Kota Surabaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan adalah upaya yang membangun daya kemampuan klien PMKS dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Pemberdayaan merupakan proses, cara, perbuatan yang membuat berdaya, yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak yang berupa akal, ikhtiar atau upaya untuk mengembangkan berbagai aspek kehidupan masyarakat baik material maupun spiritual guna mencapai cita-cita dan tujuan. Proses pemberdayaan tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi dengan keikutsertaan dan partisipasi klien PMKS sehingga berdaya guna. Pengertian pemberdayaan (empowerment) tersebut menekankan pada aspek pendelegasian kekuasaan, memberi wewenang, atau pengalihan kekuasaan kepada individu atau masyarakat sehingga mampu mengatur diri dan lingkungannya sesuai dengan potensi, dan kemampuan yang dimilikinya.

- Hasil yang Dicapai selama Pelaksanaan Pengabdian
 - a. Pencapaian Umum

Hasil pencapaian yang diperoleh dalam kegiatan pengabdian di UPTD Liponsos Keputih Kota Surabaya, yaitu :

 1. Mampu mengetahui lebih dalam mengenai prosedur pelaksanaan pelayanan dalam penerimaan dan pengambilan klien PMKS.
 2. Mampu melatih keterampilan dan mental untuk berbaur mensosialisasikan diri dengan lingkungan dunia kerja beserta klien sehingga mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan terkait antara pendekatan teori dengan praktik yang sebenarnya.
 3. Melatih rasa tanggung jawab dan disiplin praktikan terhadap pengolahan informasi dan manajemen waktu dalam menjalankan tugas yang diberikan.
 - b. Pencapaian Khusus

Hasil pencapaian yang didapatkan oleh penulis selama melaksanakan pengabdian pemberdayaan klien PMKS di UPTD Liponsos Keputih adalah secara tidak langsung mempelajari proses pelayanan penerimaan dan pengembalian klien. Berikut hasil pencapaian lainnya yang diperoleh selama menjalankan tugas yang diberikan pada Kuliah Kerja Praktik, yaitu :

 1. Mengetahui cara penempatan klien sesuai dengan barak masingmasing.
 2. Mengetahui alur penerimaan dan pengembalian klien yang sesuai dengan

prosedur.

3. Mengetahui dokumen-dokumen yang dibutuhkan pada saat penerimaan dan pengembalian klien PMKS.



● Analisis Pelaksanaan Pengabdian

a. Kegiatan Utama

Kegiatan yang sering dilakukan selama Pengabdian di bagian pelayanan yaitu mencatat penerimaan dan pemulangan klien sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

● Faktor Pendukung

- a. Fasilitas tempat dan karyawan serta pembimbing Pengabdian yang mendukung penuh selama kegiatan Pengabdian berlangsung.
- b. Pegawai selalu memberikan pekerjaan kepada peserta Pengabdian, oleh sebab itu peserta magang dapat meringankan pekerjaan pegawai UPTD Liponsos.

● Faktor Penghambat

- a. Proses pelayanan penerimaan dan pengambilan PMKS masih manual, hal tersebut menghambat proses pendaftaran klien baru dan terjadi antrian yang banyak.
- b. Pengalaman peserta Pengabdian yang masih sedikit sehingga mempengaruhi kecepatan dalam bekerja dibandingkan dengan pegawai kantor.

● Teori Pendukung Penyelesaian Pekerjaan Pengabdian

Teori Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Prinsip-prinsip yang ada didalam Undang-Undang Keputusan Menpan No. 63 Tahun 2003 yang diantaranya :

- 1) Kesederhanaan : prosedur pelayanan tidak berbelit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan. Seperti halnya didalam Liponsos Keputih Surabaya, pelayanan di Liponsos ini sudah sesuai dengan SOP yang diterapkan menurut Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2016. Yang dimana sangat mudah dimengerti juga bagi keluarga atau rekan klien yang ingin menjemput atau mengambil klien.
- 2) Kelengkapan sarana dan prasarana : tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja, dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika. Sama halnya didalam Liponsos yang

sudah memiliki kendaraan pribadi berupa truk dan mobil ambulance yang digunakan untuk mobilitas sehari-hari tanpa perlu meminjam dari instansi lain. Selain itu Liponsos juga sudah menyediakan kelengkapan alat tulis, alat elektronik, papan informasi, ruang pelayanan, maupun ruang tunggu. Keberadaan tersebut yang membuat pelayanan menjadi lebih aman dan nyaman bagi pegawai maupun masyarakat.

- 3) Kepastian waktu : pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Pegawai selalu tepat waktu terkait masalah batas waktu pengambilan klien yang tertuang dalam SOP Perwali Kota Surabaya Nomor 36 Tahun 2016 yang bagaimana batas pengambilan paling cepat selama dua hari dan paling lama selama lima hari. Dan bagi klien PMKS yang sudah pernah tertangkap razia lebih dari satu kali, maka pembinaan di Liponsos paling cepat ialah 4 hari dan paling lama adalah selama 10 hari.
- 4) Tanggung jawab : Pimpinan penyelenggaraan pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik. Sama halnya di Liponsos Keputih Surabaya yang bagaimana peran Kepala UPTD Liponsos bertanggung jawab atas terselenggaranya proses pelayanan publik didalam lingkup ruang UPTD Liponsos Keputih Surabaya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dengan adanya kegiatan pengabdian yang dilaksanakan oleh mahasiswa diharapkan dapat membantu mewujudkan visi misi menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui upaya-upaya Partisipatif. Banyak sekali sarana dan prasarana yang menunjang agar layanan tersebut berjalan dengan lancar. Hal ini bukan merupakan hal yang mudah bagi Pemkot Surabaya, jadi harus tetap ada dukungan dari Masyarakat agar tercipta Masyarakat Kota Surabaya yang sejahtera. Saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah semua staff Dinas Sosial Kota Surabaya tetap berdiri teguh dan bekerja dengan porsinya mereka. Menjaga sikap dan kerjasama merupakan salah satu kunci menjadikan pekerjaan yang menyenangkan dan lingkungan yang positif. Sehingga, apabila bekerja di situasi seperti ini dapat menghasilkan pekerjaan yang maksimal. Sehingga Visi Misi Dinas Sosial Kota Surabaya dalam pengetasan PMKS dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Daud, Y. (2019). *Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Berbasis Web*. 4(1), 30–39.
- Sambiran, S. (2021). Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Manado (Studi Di Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado). *Jurnal Governance*, 1(2), 1–9.
- Sumber diakses pada 27 November 2023, dari <https://dinassosial.surabaya.go.id/>